



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan Nomor 140/04 tanggal 03 Januari 2019 Perihal Permohonan Penganggaran kembali Sisa Dana Desa Ta. 2018;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 050.13/0178 tanggal 30 Januari 2019 Perihal Perubahan Penjabarann Anggaran DAK Fisik Kesehatan Kabupaten Asahan;
 - d. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 050/0290-Peren/2019 tanggal 1 Februari 2019 Perihal Mohon Persetujuan Perubahan Rincian Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan bersumber dari DAK Fisik Reguler Tahun 2019;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Nomor 660.1/300/LH/2019 tanggal 18 Februari 2019 Perihal Usulan Perubahan Penjabaran APBD TA. 2019;
 - f. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan Nomor 600/0170 tanggal 18 Februari 2019 Perihal Pergeseran Mata Anggaran Belanja Biaya Penunjang DAK Tahun 2019;

- g. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor 470.900/176 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Usulan Perubahan Penjabaran APBD TA. 2019;
- h. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan Nomor 900/0239 tanggal 19 Februari 2019 Perihal Usulan Perubahan Nama Kegiatan pada APBD Tahun 2019;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Asahan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
a. Pendapatan			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 138.454.325.243,70	Rp. 138.454.325.243,70	Rp. 0,00
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.244.759.783.000,00	Rp. 1.244.759.783.000,00	Rp. 0,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 304.572.917.163,00	Rp. 304.862.347.163,00	Rp. 289.430.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.687.787.025.406,70	Rp. 1.688.076.455.406,70	Rp. 289.430.000,00
b. Belanja			
1. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp. 706.927.846.099,15	Rp. 706.927.846.099,15	Rp. 0,00
2) Belanja Subsidi	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
3) Belanja Hibah	Rp. 41.570.600.000,00	Rp. 41.570.600.000,00	Rp. 0,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 21.710.325.000,00	Rp. 21.710.325.000,00	Rp. 0,00
5) Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa	Rp. 6.405.803.557,80	6.405.803.557,80	0,00
6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	Rp. 245.054.062.118,00	Rp. 245.343.492.118,00	Rp. 289.430.000,00
7) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 2.000.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.025.668.636.774,95	Rp. 1.025.958.066.774,95	Rp. 289.430.000,00
2. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp. 40.177.238.530,00	Rp. 39.708.838.530,00	Rp. (468.400.000,00)
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 364.749.379.909,32	Rp. 367.060.057.909,32	Rp. 2.310.678.000,00
3) Belanja Modal	Rp. 254.691.770.192,43	Rp. 252.849.492.192,43	Rp. (1.842.278.000,00)
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 659.618.388.631,75	Rp. 659.618.388.631,75	Rp. 0,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.685.287.025.406,70	Rp. 1.685.576.455.406,70	Rp. 289.430.000,00
Surplus / (Defisit)	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00 (-)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. (2.500.000.000,00)	Rp. (2.500.000.000,00)	Rp. 0,00 (-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) 5 = 4 - 3
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	
1	PENDAPATAN	1.687.787.025.406,70	1.688.076.455.406,70	(289.430.000,00)
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.454.325.243,70	138.454.325.243,70	0,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	54.164.101.016,00	54.164.101.016,00	0,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	9.893.934.562,00	9.893.934.562,00	0,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.146.601.279,00	9.146.601.279,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.249.688.386,70	65.249.688.386,70	0,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	1.244.759.783.000,00	1.244.759.783.000,00	0,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	61.409.406.000,00	61.409.406.000,00	0,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	916.413.719.000,00	916.413.719.000,00	0,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	266.936.658.000,00	266.936.658.000,00	0,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.572.917.163,00	304.862.347.163,00	289.430.000,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	87.880.200.000,00	87.880.200.000,00	0,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.662.925.163,00	59.662.925.163,00	0,00
1 . 3 . 17	Dana Desa	146.090.415.000,00	146.379.845.000,00	289.430.000,00
1 . 3 . 18	Dana Insentif Daerah (DID)	10.939.377.000,00	10.939.377.000,00	0,00

1	2	SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	(Rp) 5 = 4 - 3
2	BELANJA	1.685.287.025.406,70	1.685.576.455.406,70	289.430.000,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.025.668.636.774,95	1.025.958.066.774,95	289.430.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	706.927.846.099,15	706.927.846.099,15	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	41.570.600.000,00	41.570.600.000,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	21.710.325.000,00	21.710.325.000,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.405.803.557,80	6.405.803.557,80	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa dan Partai Politik	245.054.062.118,00	245.343.492.118,00	289.430.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	659.618.388.631,75	659.618.388.631,75	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	40.177.238.530,00	39.708.838.530,00	(468.400.000,00)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	364.749.379.909,32	367.060.057.909,32	2.310.678.000,00
2.2.3	Belanja Modal	254.691.770.192,43	252.849.492.192,43	(1.842.278.000,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(2.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

(2) Rincian Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Asahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 15